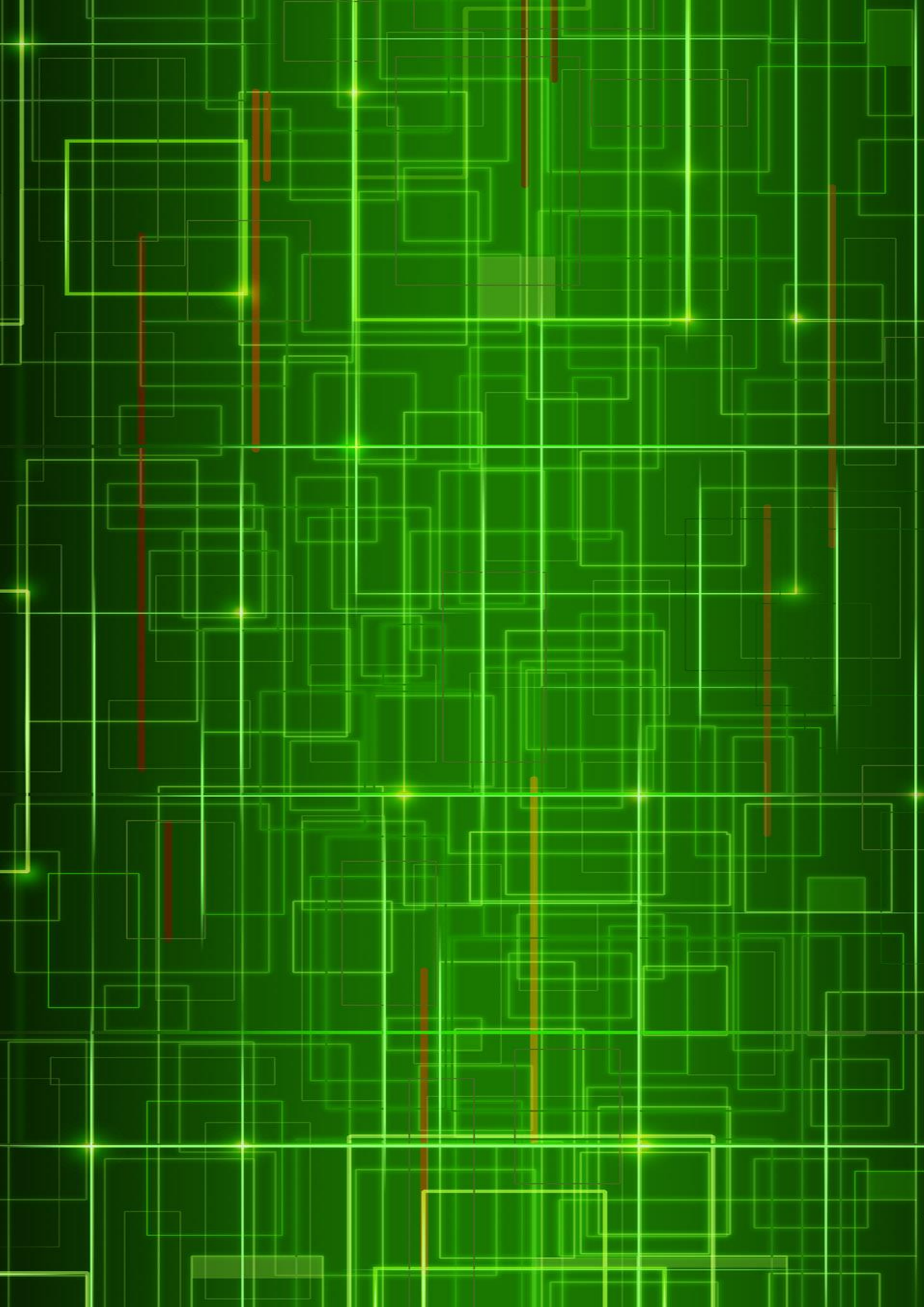




**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 21 ayat (3) disebutkan antara lain Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja (RENJA) PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Dana Indikatif .

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018, selain untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Melalui Rencana Kerja PD tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, Juli 2017

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

Ir. H. WAHYU WIDHI HERANATA, M.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610224 198901 1 002



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan	3
1.4.Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD	
 TAHUN 2016	6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra PD	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi	
Kalimantan Timur	24
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	29
2.4.Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018.....	30
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1.Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja PD	37
3.3.Program dan Kegiatan	38
3.4.Indikator Kinerja.....	41
3.5.Dana Indikatif.....	42
BAB IV PENUTUP	44
Lampiran – Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2016.....	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	31
Tabel 2.4	Kajian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dishut.....	34
Tabel 3.1	Indikator Kinerja dan Target Sasaran	41
Tabel 3.2	Program Kegiatan dan Dana Indikatif	42



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara Subtansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2018.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pergub tentang RKPD tahun 2018 yang antara lain adalah :



1. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program yang tercantum dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dalam program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum mendatang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kehutanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ____ Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tanggal ____ Juni 2017, tentang Pengesahan RENJA SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



1. Mengsinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan kebutuhan riil SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang terdapat di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018 sebagai rujukan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.
3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan PD serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
4. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD.
5. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisikan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Analisa Kinerja



Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018, Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Tahun 2016 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.

Pada tahun 2016 penyusunan Rencana Kerja mengalami tantangan yang tidak mudah yang disebabkan oleh perubahan ekonomi Kalimantan timur yang secara tidak langsung juga terkena dampak krisis ekonomi global dimana terjadi penurunan hasil ekspor sumber daya alam yang menjadi penobang ekonomi Kalimantan timur. Hal tersebut menyebabkan asumsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan DAU Kalimantan timur mengalami pengurangan sehingga berdampak pula pada penganggaran daerah terhadap Perangkat Daerah di Kalimantan timur termasuk Dinas Kehutanan. Tahun 2016 PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan sebanyak 20 Program diantaranya sebanyak 5 program merupakan Program Strategis Dinas Kehutanan serta didukung oleh 46 Kegiatan. Dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam merealisasikan target yang ditetapkan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp. 35.543.272.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk kegiatan Belanja Langsung.

Dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 88.182.467.551, - (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan pembagian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 54.795.757.551,- (Lima Puluh Empat Milyar TUjuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta TUjuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 33.386.710.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta



Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dimana terdapat perbedaan jumlah nilai rupiah dari yang direncanakan awal pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 dengan selisih kurang lebih Rp. 2.174.520.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dengan adanya perbedaan anggaran dari yang telah direncanakan tersebut tidak diikuti dengan perubahan target dari Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena melakukan perubahan target program dan kegiatan dari SKPD harus melalui proses Revisi Renstra SKPD Dinas Kehutanan dimana proses tersebut diawali dari Review RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang mana hal tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur bukan wewenang SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada bulan Agustus 2016 saat penyusunan dokumen Renja Perubahan, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendapat tambahan pagu indikatif menjadi total sebesar Rp. 22.527.490.572,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau mendapat peningkatan anggaran sebesar Rp. 636.190.572,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), untuk menanggulangi defisit anggaran APBD Murni TA. 2016 beredar surat gubernur perihal Penghematan Belanja SKPD, sehingga SKPD Dinas Kehutanan melakukan beberapa penghematan belanja. Setelah ditetapkannya Dokumen DPA Perubahan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerima pagu anggaran sebesar Rp. 19.609.351.056,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau penurunan sebesar 41,27% terhadap pagu awal. Pagu perubahan menunjukkan penurunan terhadap anggaran pada dokumen renja perubahan sebesar Rp. 2.918.139.516,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) atau penurunan sebesar 13% terhadap pagu renja perubahan.



Adapun tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diakhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat capaian program pelayanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.470.829.090,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) atau 95,45% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 260.575.880,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.731.404.970,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Keuangan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Timur sebesar Rp. 1.209.355.695,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 96,08% dengan sisa dana sebesar Rp. 49.298.835,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.258.654.530,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat capaian program dan kegiatan ini berdasarkan pada jumlah pegawai yang ada, sehingga masing-masing unit satuan kerja realisasi fisik berbeda-beda. Adapun realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 30.558.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah), dengan realisasi fisik Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 100 %.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi keuangan untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 21.726.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah), dari total pagu anggaran program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar Rp. 21.726.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun capaian fisik dari pelaksanaan program ini sebesar 100%.

5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Program Prioritas)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah yang termasuk dalam Program Prioritas SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dimana program ini ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Penanaman 1 (satu) juta batang bibit.
- 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pelaksana dari kegiatan ini selain dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga dilaksanakan oleh UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun anggaran 2016 memiliki target sebesar 104 Hektar (hasil revisi sebelumnya target 124 hektar) dengan hasil capaian target adalah sebesar 104 Hektar.

Tingkat realisasi keuangan capaian program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebesar Rp. 2.514.466.285,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 99,68% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.094.445,- (Delapan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.522.560.730,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (74 Hektar) dan UPTD Pengelola Tahura Bukit Suharto (30 Hektar). Dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merealisasikan keuangan sebesar Rp. 1.975.748.428,-



(Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribuan Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan UPTD Pengelola Tahura Bukit Suharto merealisasikan sebesar Rp. 538.717.857,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribuan Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Dalam melaksanakan kegiatan terdapat hal – hal yang menjadi kendala dilapangan yaitu kesulitan mencari lahan yang clear and clean yang berada di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan terkendala dengan perencanaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang orientasi pemanfaatannya kurang dari 5 (Lima) Tahun.

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tingkat realisasi keuangan capaian program ini sebesar Rp. 2.997.238.500,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribuan Lima Rupiah) atau sebesar 98,30% dan sisa anggaran sebesar Rp. 51.886.800,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribuan Delapan Ratus Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.049.125.300,- (Tiga Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuan Tiga Ratus Rupiah), dengan realisasi fisik mencapai 100%.

7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan
- 2) Fasilitasi Peningkatan Produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SLVK, FSC)

Tingkat realisasi keuangan capaian program ini sebesar Rp. 460.060.219,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Ribuan Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau sebesar 99,62% dengan sisa anggaran Rp. 1.755.871,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribuan Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 461.816.090,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan



Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah), dengan realisasi fisik mencapai 100%.

8. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh 3 (tiga) UPTD lingkup Dinas Kehutanan yaitu UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah, UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan dan UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara. Ketiga UPTD melaksanakan kegiatan yang sama di masing masing wilayah dengan tingkat capaian kinerja program ini adalah sebesar 99%, dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.829.140.027,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 98,61% sisa dana sebesar Rp. 25.698.660,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.854.838.687,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

9. Program Penganggulungan Kemiskinan Bidang Kehutanan (Program Prioritas)

Program ini adalah salah satu dari Program yang termasuk dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Program Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan, yaitu melalui Pemberian Pelatihan Okulasi durian dan Inokulasi gaharu bagi 30 orang masyarakat yang berada di 7 desa sekitar hutan. Tingkat realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 252.631.100,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 88,86% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 31.668.900,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 284.300.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), realisasi fisik mencapai 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi



diantaranya yaitu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan belum mencukupi untuk mengakomodir desa – desa yang berada di Kalimantan Timur, tingkat pengetahuan masyarakat desa tentang pertanian modern masih kurang dimana kebiasaan/tradisi desa masih mengandalkan sumber daya alam yang tersedia sehingga sulit dalam mengaplikasikan hasil pelatihan yang telah diberikan, selain itu juga lokasi beberapa desa yang jauh dan sulit dijangkau oleh kendaraan sehingga menimbulkan permasalahan dalam pendistribusian.

10. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan.

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 436.349.044,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.253.456,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 441.602.500,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Capaian kinerja Program Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan adalah sebesar 100%.

11. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan terdapat 3 (tiga) kegiatan pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun yang dilaksanakan di tahun 2015 adalah 1 (satu) kegiatan yaitu Review dan Penataan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan. Realisasi Kinerja program ini adalah sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Capaian Program ini sebesar Rp. 102.399.050,- (Seratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 71,91% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 40.008.950,- (Empat Puluh Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima



Puluh Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 142.408.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah).

12. Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum.

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 368.304.100,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 95,62% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 16.881.200,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 385.185.300,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

13. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi, kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam (PPA).
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan, kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL).

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 628.672.830,- (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 99,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.852.670,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 630.525.500,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi Kinerja Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan adalah sebesar 100%.

14. Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan



Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 248.108.059,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 99,26% sisa dana sebesar Rp. 1.838.300,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Tiga Ratus Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 249.946.359,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dalam pelaksanaan tidak mengalami hambatan.

15. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove (Program Prioritas)

Program Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah Program Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi Capaian Kinerja Program ini adalah sebesar 100% yaitu melaksanakan pemeliharaan tanaman mangrove tahun ke-2 seluas 20 Hektar, Realisasi Keuangan capaian program ini sebesar Rp. 655.574.900,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 99,99% sisa dana sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 655.624.900,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan kendala yang dihadapi dalam rangka memenuhi target luas Rehabilitasi Hutan Mangrove sesuai target Renstra dan RPJMD serta perbaikan kondisi lahan secara umum adalah kurang tersedianya alokasi dana dari APBD dan sulitnya mencari lahan clear and clean yang berada dalam kawasan hutan mangrove serta untuk pelaksanaan rehabilitasi dalam kawasan mangrove terkendala dengan perencanaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

16. Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan.

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 387.433.400,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 96,90% sisa dana sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus



Ribu Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 399.833.400,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Rupiah) dalam pelaksanaan tidak mengalami hambatan.

17. Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 463.503.916,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar 91,42% sisa dana sebesar Rp. 43.506.424,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 507.010.340,- (Lima Ratus Tujuh Juta Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah). Adapun realisasi kinerja capaian program ini adalah sebesar 100% sesuai dengan yang direncanakan.

18. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH (Program Prioritas)

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 831.015.950,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 99,46% sisa dana sebesar Rp. 4.505.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 835.520.950,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH, melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan KPH berupa sosialisasi dan koordinasi pembentukan KPHP; koordinasi/konsultasi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH; Supervisi pelaksanaan kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); pembinaan & pengamanan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Inventarisasi ijin-ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan di 14; perlindungan pengamanan kawasan hutan (areal berijin dan tidak berijin) di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (10 Tahun) dimana proses penyusunannya dilaksanakan oleh UPT Kementrian (BPKH Wilayah IV) bersama Tim Ahli belum selesai hingga saat ini dan belum disahkan.



19. Program Pelestarian Kawasan – Kawasan Bernilai Ekosistem Tinggi (Program Prioritas)

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 142.824.500,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 97,35% sisa dana sebesar Rp. 3.885.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 146.709.500,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Adapun realisasi kinerja capaian program ini adalah sebesar 100% sesuai dengan yang direncanakan.

20. Program Peningkatan Peran Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat

Tingkat capaian program ini sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) hal ini disebabkan karena program ini termasuk dalam program yang mengalami penundaan karena tidak tersedia anggaran.



**TABEL 2.1 EVALUASI HASIL RENJA SKPD
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2015)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</i>	50	Dinas+ UPTD	38.700.963.910	20,00	7.786.721.000	10	5.731.404.970	10	5.470.829.090	100	95	30	13.257.550.090	60	34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	16685	Srt	346.020.000	6.686	37.209.000	3337	31.003.000	3.337	30.234.499	100,00	97,52	10.023,0	67.443.499	60,07	19,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan (408 org / bulan)	60	bln	5.927.960.000	24	937.805.000	12	1.197.097.634	12	1.043.819.800	100,00	87,20	36,00	1.981.624.800	60,00	33,43
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan (10.645 m2 / bulan)	60	bln	1.815.900.000	24	442.331.000	12	41.332.200	12	38.824.000	100,00	93,93	36,00	481.155.000	60,00	26,50
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	575	Unit	1.002.100.000	230	82.801.000	115	77.674.700	115	66.461.300	100,00	85,56	345,00	149.262.300	60,00	14,89
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan (22.949 m2/bulan)	60	bln	5.212.200.000	24	943.489.000	12	1.124.450.000	12	1.109.761.800	100,00	98,69	36,00	2.053.250.800	60,00	39,39
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	60	bln	255.472.000	24	3.640.000	23	6.155.000	23	5.680.000	100,00	92,28	47,00	9.320.000	78,33	3,65
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	195	subbid	1.867.950.000	78	394.012.000	39	128.119.908	39	128.000.108	100,00	99,91	117,00	522.012.108	60,00	27,95
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	195	subbid	1.160.425.000	78	214.107.000	39	117.346.600	39	114.864.000	100,00	97,88	117,00	328.971.000	60,00	28,35



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan (12.335 m2/bulan)	60 bln	325.900.000	24	61.150.000	12	66.610.120	12	65.300.370	100,00	98,03	36,00	126.450.370	60,00	38,80
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	158 jenis	256.378.160	68	39.310.000	30	22.547.600	30	22.530.400	100,00	99,92	98,00	61.840.400	62,03	24,12
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	52350 Exp	558.350.000	34.870	70.504.000	10470	51.367.000	10.321	50.800.000	98,58	98,90	45.191	121.304.000	86,32	21,73
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	60755 bln	2.754.295.000	33.470	413.248.000	12151	370.726.480	12.104	352.298.980	99,61	95,03	45.574	765.546.980	75,01	27,79
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	485 kali	5.685.287.500	194	1.505.217.000	97	599.336.402	97	581.184.062	100,00	96,97	291,00	2.086.401.062	60,00	36,70
	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	1.340 kali	5.943.926.250	536	1.608.548.000	268	922.038.326	257	892.219.771	95,90	96,77	793,00	2.500.767.771	59,18	42,07
	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan (orang / bulan)	60 bln	5.588.800.000	24	1.033.350.000	12	975.600.000	12	968.850.000	100,00	99,31	36,00	2.002.200.000	60,00	35,83
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100 %	20.887.745.000	88,23	5.027.708.000	81,7	1.258.654.530	82	1.209.355.695	100	96	170	6.237.063.695	170	30
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	175 (35) unit	1.836.730.000	36	233.619.000	2	8.780.000	2,00	8.780.000	100,00	100,00	38,24	242.399.000	21,85	13
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	200 Unit	2.669.120.000	62	602.662.000	9	163.913.000	9,00	162.213.000	100,00	98,96	70,59	764.875.000	35,30	29
	Pengadaan meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 pkt	573.600.000	11	82.700.000	21	-	-	-	-	-	10,79	82.700.000	21,57	14
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	50 pkt	31.300.000	9	2.850.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	75 unit	2.913.650.000	19	576.162.000	15	192.685.820	15	192.563.820	100,00	99,94	33,90	768.725.820	45,20	26
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	630 Unit	5.475.800.000	18	1.281.173.000	102	703.820.710	81	667.765.045	79,08	94,88	98,55	1.948.938.045	15,64	36
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	385 Unit	866.280.000	20	113.311.000	55	85.110.000	48	79.326.330	87,27	93,20	67,56	192.637.330	17,55	22

Bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	875 Unit	647.150.000	17	142.604.000	157	104.345.000	132	98.707.500	84,08	94,60	148,97	241.311.500	17,03	37
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</i>	5 Kasus	2.970.700.000	-	510.340.000	1	30.558.000	-	30.558.000	-	100	-	540.898.000	-	18
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	2.500 Stell	1.340.000.000	680	137.488.000	22	12.650.000	22	12.650.000	100,00	100,00	702,03	150.138.000	28,08	11,20
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	2.500 Stell	1.253.900.000	593	238.788.000	37	17.908.000	37	17.908.000	100,00	100,00	629,79	256.696.000	25,19	20,47
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	300 Stell	338.000.000	162	108.600.000	-	-	-	-	-	-	162,05	108.600.000	54,02	32,13
	Pengadaan pakaian korpri	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	69 Stell	38.800.000	84	25.464.000	-	-	-	-	-	-	84,00	25.464.000	121,74	65,63
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kuifikasi pada Unit Kerjanya</i>	100 %	2.250.000.000	75,60	524.245.000	88,1	21.726.000	88	21.726.000	100	100	164	545.971.000	164	24
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	50 Kali	1.530.000.000	20	176.300.000	6	11.726.000	6	11.726.000	100,00	100,00	25,88	188.026.000	51,76	12,29
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	50 Kali	720.000.000	17	347.945.000	3	10.000.000	2	10.000.000	66,67	100,00	18,76	357.945.000	37,51	49,71
5	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<i>Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</i>	200.000 Ha	19.677.290.000	303	4.431.337.000	## ## #	2.522.560.730	42.464	2.514.466.285	110	100	42.767	6.945.803.285	21	74
	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	Jumlah Bibit yang ditanam	1.000.000 Btg	4.660.500.000	154.000	1.238.758.000	75.000	517.224.600	75.000	517.224.600	100	100	229.000	1.755.982.600	22,90	37,68
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Hutan dan lahan yang direhabilitasi	1.175 Ha	14.233.790.000	303	3.192.579.000	104	2.005.336.130	104	1.997.241.685	100	100	407,00	5.189.820.685	34,64	36,46
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>prosentase penyerapan anggaran SKPD</i>	100 %	12.326.400.000	93,81	2.508.600.000	87	3.049.125.300	87	2.997.238.500	100	98	181	5.505.838.500	181	45
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	437 Laporan	12.326.400.000	17	2.508.600.000	140	3.049.125.300	140	2.997.238.500	100,00	98,30	157,39	5.505.838.500	36,02	44,67



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

7	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan	100	%	6.000.000.000	100	1.746.918	80	461.816.090	80	460.060.219	100	100	180	461.807.137	180	8
	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Jumlah Pemegang Ijin Pengusahaan Hutan yang diterbitkan	320	(80) IUPHHK	4.000.000.000	119,5 ₄	1.300.803	46	315.513.650	46	315.513.650	100,00	100,00	165,54	316.814.453	51,73	7,92
	Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)	jumlah industri hasil hutan yang difasilitasi	240	(60) IUIPHHK	2.000.000.000	76,73	446.115	7	146.302.440	7	144.546.569	100,00	98,80	83,73	144.992.684	34,89	7,25
8	Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Tersedianya data potensi hutan dan status kawasan hutan dengan batas yang jelas	500	ha/km	11.337.117.500	273	2.981.310.000	164	1.854.838.687	164	1.829.140.027	100	99	437	4.810.450.027	87	42
	Inventarisasi Hutan	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi	930	ha	6.281.817.500	273	1.876.160.000	164	993.320.000	164	978.825.740	100,00	98,54	437,02	2.854.985.740	46,99	45,45
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Panjang batas yang dimonitor, disosialisasikan dan dipelihara	892	km	5.055.300.000	5	1.105.150.000	296	861.518.687	296	850.314.287	100,00	98,70	300,31	1.955.464.287	33,68	38,68
9	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan (Prioritas)	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif	35	Desa	2.750.000.000	14,00	613.023.000	7	284.300.000	-	252.631.100	-	89	14	865.654.100	40	31
	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Jumlah peserta diklat peningkatan SDM Masy. Sekitar Hutan	120	org	2.750.000.000	60	613.023.000	30	284.300.000	-	252.631.100	-	88,86	60,00	865.654.100	50,00	31,48
10	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	Jumlah Dokumen yang disusun	70	Dok	5.912.280.000	25,00	1.772.256.540	14	441.602.500	14,0	436.349.044	100	99	39	2.208.605.584	56	37
	Penyusunan pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen yang disusun	20	Dokumen	2.000.000.000	15	1.220.961.090	4	120.595.000	4	120.281.834	100,00	99,74	19,00	1.341.242.924	95,00	67,06



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

	Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen yang disusun	40	Dokumen	3.912.280.000	10,00	551.295.450	10	321.007.500	10	316.067.210	100,00	98,46	20,00	867.362.660	50,00	22,17
11	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Tersusunnya perencanaan penanganan lahan terbuka dan terlantar serta batas IUPHHK-HT yang jelas	5	Buku	4.000.000.000	2,00	900.862.955	1	142.408.000	1,00	102.399.050	100	72	3	1.003.262.005	60	25
	Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan	Luas lokasi rehabilitasi hutan dan lahan	48	IPPKH	2.000.000.000	23	900.862.955	-	-	-	-	-	-	23,00	900.862.955	47,92	45,04
	Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Luas lokasi rehabilitasi hutan dan lahan (usulan perubahan " exs. Tambang dihilangkan)	6	Dok	2.000.000.000	-	-	2	142.408.000	2	102.399.050	100,00	71,91	2,00	102.399.050	33,33	5,12
12	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	<i>Meningkatnya keamanan kawasan hutan dari gangguan pihak lain</i>	35	Kab/Kota	3.000.000.000	10,00	501.839.000	7	385.185.300	7,00	368.304.100	100	96	17	870.143.100	49	29
	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	jumlah kab/kota yang dilakukan Penyidikan dan pengamanan hutan	35	(7)Kab/Kota	3.000.000.000	10	501.839.000	7	385.185.300	7	368.304.100	100,00	95,62	17,00	870.143.100	48,57	29,00
13	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan dan lahan serta pengelolan kawasan lindung	100	%	4.600.000.000	17,00	1.346.651.000	50	630.525.500	50	628.672.830	100	100	67	1.975.323.830	67	43
	Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi	Luas areal plasma nutfah yang dibina kelestariannya	696	ha	2.000.000.000	17	330.742.000	348	220.864.900	348	219.012.230	100,00	99,16	365,00	549.754.230	52,44	27,49
	Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan	Jumlah titik kebakaran hutan	2.886	Titik Hotspot	2.600.000.000	3.318	1.015.909.000	520	409.660.600	520	409.660.600	100,00	100,00	3.838	1.425.569.600	132,99	54,83
14	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Terjaminnya usaha kehutanan yang lestari	155	usaha kehutanan	2.910.000.000	78,00	1.200.382.000	31	249.946.359	17	248.108.059	55	99	95	1.448.490.059	61	50



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan	360	IUPHHK	2.910.000.000	78	1.200.382.000	17	249.946.359	17	248.108.059	100,00	99,26	95,00	1.448.490.059	26,39	49,78
15	Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	Jumlah areal kerja yang dicadangkan untuk usaha kehutanan masyarakat	100	%	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR)	Jumlah fasilitasi pencadangan areal kerja kehutanan masyarakat	9	Kali	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Program Kemitraan	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa, HKm, dan Kemitraan	9	Kali	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Program Rehabilitasi Mangrove (Prioritas)	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	400	ha	5.000.000.000	116,6₂	209.145.000	40	655.624.900	94,00	655.574.900	235	100	211	864.719.900	53	17
	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas penanaman mangrove	400	Ha	5.000.000.000	117	209.145.000	40	655.624.900	40	655.574.900	100	99,99	156,62	864.719.900	39,16	17,29
17	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan	5	Jenis	2.100.000.000	2,00	684.938	1	399.833.400	1,00	387.433.400	100	97	3	388.118.338	60	18
	Fasilitasi kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah diklat, identifikasi, fasilitasi, promosi hasil hutan bukan kayu	4	Pelatihan	2.100.000.000	2	684.938	1	399.833.400	1	387.433.400	100,00	96,90	3,00	388.118.338	75,00	18,48
18	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan perubahan iklim (REDD+)	35	Kab/Kota	6.365.480.000	14,00	712.244.000	7	507.010.340	7,00	463.503.916	100	91	21	1.175.747.916	60	18
	Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	jumlah pelatihan, sosialisasi dan workshop implementasi REDD+	24,00	Pelatihan	1.600.000.000	11	712.244.000	1	445.935.340	1	418.045.366	100,00	93,75	12,00	1.130.289.366	50,00	70,64
	Mengimplementasi Strategi Daerah REDD+ (Berbasis pada Restranas REDD+, SARP dan	jumlah proyek percontohan REDD+	30,00	Pelatihan	1.065.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

	RAD GRK serta Kebutuhan Daerah)																
	Kegiatan Penyiapan Instrumen dan Implementasi REDD+	Jumlah monitoring, pendampingan, pengayaan informasi dan workshop safeguards	46,00	Pelatihan /wshop	3.700.000.000	-	-	6	61.075.000	6,00	45.458.550	100,00	74	6,00	45.458.550	13,04	1,23
19	Program Pengelolaan dan Pembangunan KPH (Prioritas)	Terkelolanya KPH secara mandiri	20	KPH	1.975.000.000	3,00	1.368.331.560	8	835.520.950	8,0	831.015.950	100	99	11	2.199.347.510	55	111
	Pengelolaan dan Pembangunan KPH	Jumlah dokumen kegiatan yang disusun	195	Dok	1.975.000.000	3	1.368.331.560	47	835.520.950	47	831.015.950	100,00	99,46	50,00	2.199.347.510	25,64	####
20	Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	<i>Jumlah HCV di Kawasan Hutan</i>	6	HCV	2.300.000.000	-	-	1	146.709.500	1,00	142.824.500	100,00	97,35	1,00	142.824.500	16,67	6,21
	Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	jumlah dokumen inventarisasi dan fasilitasi kawasan konservasi bernilai tinggi (KBKT)	4	Dok	2.300.000.000	-	-	1	146.709.500	1	142.824.500	100,00	97,35	1	142.824.500	25,00	6,21



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi, fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan KPHP dan KPHL; rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, yaitu meliputi : perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam



- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi KSDAE, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan serta Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan struktur organisasi meliputi :

1. Kepala Dinas Kehutanan 1 (satu) orang
2. Sekretaris Dinas Kehutanan 1 (satu) orang, dan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan memiliki 3 (tiga) Sub Bidang /Seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Tata Hutan
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.



4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi KSDAE memiliki 3 (tiga) Sub Bidang/Seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
5. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL memiliki 3 (tiga) Sub Bidang/Seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki 3 (tiga) Sub Bidang/Seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan Kehutanan
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Hutan Adat
7. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu dengan 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari :
 - a. 8 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Bongan, Santan, Meratus)
 - b. 1 UPTD Pengelolaan Tahura Bukit Suharto

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diukur berdasarkan target sasaran pada kurun waktu perencanaan yang telah dilakukan lima tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanan serta tugas dekonsentrasi dan perbantuan di sektor kehutanan.



**TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Indikator	Rencana Pencapaian	Satuan	Target Restra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Anallisis
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	57	%	19	19	19			19	19	19			Untuk target Renstra 2017 telah berubah seiring dengan terbentuknya Struktur Organisasi Dinas Kehutanan yang baru sebagai implementasi berlakunya UU No.23 Tahun 2014
2	Persentase Tahapan Proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	30	%	10	10	10			10	10	10			
3	Persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutan	12	%	4	4	4			4	4	4			
4	Jumlah Kab/Kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	7	Kab/Kota	7	7	6			7	7	6			
5	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	215	Ha	25	150	40			25	20	40			
6	Luas Rehabilitasi hutan dan lahan	200000	Ha	38.750	38.750	38.750			150.000	56.224	42.464,21			
7	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfa dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	1800	Ha	0	0	1800			0	0	11.348			



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

8	Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, Hutan rakyat)	0	%	0	0	0			0	0	0			
9	Bertambahnya jumlah industri hasil hutan	42	Unit	6	32	4			6	32	4			
10	Jumlah pelaku usaha HHBK dan jasa lingkungan	3	Lokasi	1	1	1			1	1	1			
11	Jumlah kabupaten yang terjamin usaha kehutanan yang berkelanjutan	7	Kab/Kota	7	7	7			7	7	7			
12	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan maupun lahan kebun	1 Jt	Rp.	0	0	1 Jt			0	0	1 Jt			
13	Persentase penurunan emisi dari bidang kehutanan	2,9	%	0	2,9	2,9			0	2,9	2,9			
14	Jumlah DBH PNBK sektor kehutanan	26 Milyar	Rp.	-	-	-	13 Milyar	13 Milyar	-	-	-	13 Milyar	13 Milyar	Target sesuai tupoksi struktur organisasi baru sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014
15	prosentase luas kerusakan hutan	1	%	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	
16	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	77500	Ha	-	-	-	38.750	38.750	-	-	-	38.750	38.750	
17	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	5	Jenis Usaha	-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	





2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Degradasi hutan baik pada kawasan hutan maupun pada lahan diluar kawasan hutan sehingga berakibat pada semakin kritisnya kondisi Daerah Aliran Sungai.
2. Konflik pemanfaatan kawasan hutan yang disebabkan belum jelasnya status dan fungsi sebagian kawasan hutan akibat belum selesainya proses pengukuhan hutan.
3. Taraf hidup masyarakat petani disekitar kawasan hutan masih belum sejahtera sehingga berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap keutuhan dan kelestarian hutan.
4. Kebutuhan lahan oleh masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat disekitar hutan telah mendorong meningkatnya gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan, penjarahan dan peredaran kayu ilegal. Sementara itu upaya pembangunan hutan berbasis masyarakat belum terlihat secara nyata.



2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan akhir usulan RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Persandingan antara Rancangan RKPD 2018 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun Program Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Program Tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

2. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- b. Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi.

Program Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tertera dalam tabel 2.3. dibawah ini :



Tabel 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	11 DAS	153.000.000.000	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	11 DAS	157.000.000.000	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	2.237.266.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	8.342.215.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	616.734.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	4.107.464.300	



Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	201.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	3.423.548.000	
5	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LAKIP	35.000.000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LAKIP	919.720.000	
6	Program penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan Perhutanan Sosial	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Jumlah kelompok tani hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial dan kemitraan	5 Kelompok Tani Hutan	25.000.000	Program penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan Perhutanan Sosial	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Propinsi	Jumlah kelompok tani hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial dan kemitraan	5 Kelompok Tani Hutan	2.235.000.000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap setiap program/kegiatan yang direncanakan baik internal maupun eksternal diupayakan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat (*pro poor, pro job, pro growth dan pro environment*).

Arah Kebijakan Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu berupa "Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial" dan "Kegiatan Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan" merupakan salah satu program yang menjadi unggulan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur masyarakat sekitar hutan dan aneka usaha hasil hutan, memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan juga penting, terutama dalam upaya meningkatkan nilai dan daya saing hasil hutan, dan hal ini akan dicapai apabila kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka akan mendukung pemanfaatan ekonomi hutan secara optimal dan sekaligus mewujudkan pelestarian hutan serta fungsinya akan terjaga secara baik.

Masyarakat sekitar hutan merupakan penjaga hutan sehari-hari. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka hutan akan tetap terjaga. Sebaliknya, bila masyarakatnya miskin, maka akan mengganggu kelestarian hutan bahkan jika kegiatan hutan tidak melibatkan masyarakat justru mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dan bakal membuka akses yang memicu konflik sosial.

Diharapkan masyarakat memiliki jaminan untuk mengelola hutan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu, juga dikembangkan pola kerjasama antara pihak-pihak, seperti kemitraan dengan pemegang konsesi. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kelembagaan merupakan hal yang prioritas, sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri dan profesional dalam mengelola hutan.

Melalui aneka usaha hasil hutan dengan program hutan desa, hutan kemasyarakatan hutan rakyat membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan baik kayu atau non kayu secara legal, peran



pemerintah dan lembaga pendampingan untuk mendukung masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.4. Kajian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Dana	Lokasi	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang melaksanakan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan	2.235.000.000,-	Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu, Luar Provinsi.	5 Kelompok Tani Hutan

Program Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial merupakan program Unggulan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan meningkatkan perekonomian/pendapatan dan kepastian usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan sasaran Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan yang dilakukan dengan cara memberikan Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, kemudian memberikan Pendampingan peningkatan usaha perhutanan sosial dan kemitraan, Peningkatan kapasitas penyuluh, Peningkatan kapasitas PKSM dan Pencinta alam, Pembinaan pengelolaan unit usaha program perhutanan sosial dan kemitraan bidang kehutanan, koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/Kelola sosial/Comdev/CSR, Identifikasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat.



BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran strategis kegiatan pembangunan lingkungan hidup kehutanan wilayah Kalimantan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015), yaitu:

1. Penanganan DAS yang meliputi: pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas;
2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
3. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu (HHBK);
5. Meningkatnya populasi satwa terancam punah;
6. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove;
7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah *hot spots kebakaran hutan*;
8. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen (s/d 2014 50,33% terhadap kawasan hutan di Kalimantan);
9. Tata batas /rekonstruksi batas kawasan hutan (40.000 km seluruh Indonesia, Kalimantan = 13.320 km);
10. Operasionalisasi KPH (21 KPH Model yang terdiri dari 17 KPHP dan 4 KPHL, dari 111 KPH yang sudah ditetapkan);



11. Peningkatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019 untuk seluruh Indonesia).
12. Peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman, hutan alam dan hutan rakyat dalam periode 2015-2019 (5 tahun);
13. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK Nasional sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
14. Dalam rangka mendukung program surplus beras sebesar 10 juta ton, Kementerian LHK menyiapkan pencadangan lahan seluas 307.700 ha : di Kalteng 178.572 ha, Kaltim 9.922 ha, Kalbar 119.376 ha

Sedangkan Arah Kebijakan Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan 2013 - 2018 adalah "Jasa Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim" serta yang menjadi Program Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang pada RPJMD hasil revisi adalah "Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)", berdasarkan hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti yang tersebut diatas. Selain dari pada itu Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial akan menjadi salah satu dari fokus dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga diharapkan Kebijakan dan Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 tersebut memberikan nilai tambah terhadap ekonomi Kalimantan Timur baik secara langsung atau tidak langsung dimana hal tersebut merupakan salah satu penjabaran dari **Tema RKPD Tahun 2018 yaitu "Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata"**.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai yaitu, “Visi : Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Terpadu dan Berkelanjutan Berspektif Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur” dan Misi yaitu :

MISI 1 : Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan

MISI 2 : Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

MISI 3 : Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka meningkatkan persediaan carbon hutan

MISI 4 : Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan atau Sekitar Kawasan Hutan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2013 – 2018 yaitu:

1. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan;
2. Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
4. Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan;

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2013 – 2018 yaitu:

1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan
2. Menurunnya luas kerusakan hutan
3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan demi mendukung terealisasinya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD Provinsi dan APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun Program dan Kegiatan sumber dana APBD Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan karena dilandasi oleh kebutuhan akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana didalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana administrasi perkantoran yang memadai, disamping untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

- 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan karena dilandasi atas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional perkantoran, pemeliharaan kendaraan operasional untuk kelancaran kegiatan sehingga terhindar dari kendaraan yang tidak laik operasional, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan perlengkapan serta peralatan, sehingga baik gedung kantor beserta sarana dan prasarannya dapat digunakan dengan baik dan nyaman untuk mendukung tercapainya tujuan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur .



Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

- 1) *Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana*

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa publikasi berupa spanduk, baliho, plakat, propaganda ataupun pameran, diharapkan program ini dapat memenuhi kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengikuti kondisi yang berlaku. Termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan minum rapat dan kebutuhan koordinasi dan konsultasi lembaga Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur antara lain :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Program ini dilaksanakan sebagai salah kegiatan wajib mengikat yang harus dipenuhi yaitu penyediaan dokumen – dokumen yang merupakan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKA, DPA) serta dokumen pelaporan (LKIP, LPPD, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dll) dimana dokumen dokumen tersebut merupakan bagian dari penilaian Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur antara lain :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- 2) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan



5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Program ini adalah program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana program ini dilaksanakan dengan sumber dana APBN yaitu dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pendamping dari APBD Provinsi. Program ini dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan antara lain :

- 1) *Rehabilitasi Hutan dan Lahan*
- 2) *Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir*

6. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial

Program ini dilaksanakan dalam rangka usaha peningkatan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan, pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan peredaran hasil hutan dan melaksanakan evaluasi perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Monitoring dan evaluasi perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan antara lain :

- 1) *Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.*
- 2) *Pendampingan peningkatan usaha perhutanan sosial dan kemitraan.*
- 3) *Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan*
- 4) *Peningkatan kapasitas PKSM dan Pencinta Alam*



- 5) *Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan bidang kehutanan*
- 6) *Koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/kelola sosial/comdev/CSR*
- 7) *Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan resolusi konflik*
- 8) *Identifikasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat*
- 9) *Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi*

3.4 Indikator Kinerja

Sebagai upaya pencapaian RPJMD maka ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang merupakan Program Prioritas dengan indikator kinerja dan target sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Pencapaian Sasaran		
				2017	2018
1	2	3		7	8
Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor kehutanan	Rp.		Rp. 13.000.000.000,-	Rp. 13.000.000.000,-
Menurunnya luas kerusakan hutan	prosentase luas kerusakan hutan	%		1%	1%
Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Hektar		38.750	38.750
Peningkatan peran serta masyarakat	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan	Jumlah Jenis Usaha		5	5



dalam mengelola hutan	masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan				
-----------------------	--	--	--	--	--

3.5. Dana Indikatif

Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 156.115.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Program / Kegiatan dan Dana Indikatif

KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	PAGU INDIKATIF	
								TAR GET	ANGGARAN
3	0	01	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	100	2.237.266.000
	4		7	01	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jml Bln	12	2.237.266.000
3	0	01	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	616.734.000
	4		8	05	- Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	- Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jml Bln	12	616.734.000
3	0	01	0		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	100	201.000.000
	4		9	02	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Jumlah Publikasi	Jumlah Bulan	12	201.000.000
						- Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat	0	
						- Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jml Koordinasi	10	
						- Bulan penyediaan makanan dan minuman	Jml Bln	12	
3	0	01	1		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LKIP	68	35.000.000
	4		0						



				01	- Penyusunan laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja	- Jumlah Dokumen yang disusun	Dok	5	10.000.000
				03	- Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pendampingan dan Pelaporan	Dok	10	25.000.000
3	0	01	3		Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	Jml DAS	11	153.000.000.000
				08	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Luas Penanaman dan Pemeliharaan		0	143.955.325.000
				09	- Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	- Jumlah Luasan Rehabilitasi Mangrove		0	9.044.675.000
				10	- Fasilitasi Peningkatan Tertib luran Di Sekor Kehutanan	jumlah pemegang ijin perusahaan hutan yang divalidasi		0	-
2	2	02	3		Program penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok tani hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial dan kemitraan	Kelompok Tani Hutan	5	25.000.000
				01	- Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	- Jumlah kelompok tani hutan yang dibentuk	KTH	5	20.000.000
				02	- Pendampingan peningkatan usaha perhutanan sosial dan kemitraan	- Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang mendapat pendampingan	Unit Usaha	0	-
				03	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	- Jumlah penyuluh yang dilatih	Orang	0	-
				04	Peningkatan kapasitas PKSM dan Pencinta Alam	Jumlah PKSM dan kelompok Pencinta Alam yang terbentuk dan dilatih	Kelompok Tani Hutan	0	-
				05	Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan bidang kehutanan	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang dibina	Unit Usaha	0	-
				06	Koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/ kelola sosial/comdev/CSR	Jumlah koordinasi	Kali	0	-
				07	Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan resolusi konflik	Jumlah Dokumen	Dok	0	-
				08	Identifikasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat	Jumlah lokasi permohonan pengelolaan hutan	Lokasi	0	-
				09	Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi	Jumlah Rapat	Kali	6	5.000.000
									156.115.000.000



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini disusun sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 21 ayat (3) disebutkan antara lain Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan disusunnya Renja PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan didalam penyusunan usulan rencana kegiatan Tahun 2018 oleh kepala satuan kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, disadari sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kekurangan, dan masih perlu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.